

TUJUAN TIONGKOK MENEMPATKAN ANJUNGAN MINYAK HYSY 981 DI AREA PERSENGKETAAN LAUTAN BARAT PARACEL

Zaib Zakaria Mannakari¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, Anak Agung Ayu Intan Prameswari³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: zaibzakariamannakari@gmail.com¹⁾, ratihkumaladewi@unud.ac.id²⁾, prameswari.intan@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This research aims to explain the purpose of China's decision to deploy the HYSY 981 oil rig on the contested waters of the Parcel Islands on 2014, using qualitative research methods. The theoretical framework used in this research consists of geopolitics theory and the concept of power projection. Policies are made to fulfill a state's goal in accordance to Geopolitics, which is territorial expansion. To achieve this, China made a policy to project their power towards the Parcel Islands. However, China faces sustainability issues. This research then concludes that China's purpose behind their decision on placing the HYSY 981 rig on the contested waters is to establish a reliable energy field for their power projection in the Paracels. The establishment of a reliable energy field would solve the sustainability issue that China is facing in projecting their military power towards the Parcel Islands.

Keywords: China, Vietnam, HYSY 981 Rig, Power Projection

1. PENDAHULUAN

Pada awal bulan Mei tahun 2014, Tiongkok menempatkan sebuah anjungan minyak di perairan barat Paracel. Anjungan minyak tersebut bernama Hai Yang Shi You 981, atau disingkat HYSY 981. Anjungan minyak ini berjenis semi-submersible, yang berarti lokasinya tidak permanen dan dapat berpindah dengan bantuan kapal (Dhung, 2015). Operasi dan pembangunan anjungan minyak ini memakan biaya yang tidak sedikit, mencapai 6 miliar renminbi atau sekitar 12 triliun rupiah ("Not the usual drill," 2014). HYSY 981 juga sebelumnya telah diuji coba di lautan Tiongkok selama hampir satu tahun pada tahun 2012. Layaknya anjungan minyak permanen, anjungan minyak ini mampu melakukan eksploitasi gas bumi yang berada di dasar laut ("China's Massive Disputed Oil Rig Near Vietnam Is Now Drilling," 2014). Ini

menjadi pertama kalinya Tiongkok melakukan eksploitasi energi di Laut Tiongkok Selatan (Yates, 2014). Tiongkok sebelumnya hanya pernah melakukan eksploitasi perikanan di perairan Paracel.

Penempatan anjungan minyak HYSY 981 bertempat di perairan barat Paracel yang masih dipersengketakan. Selain itu, perairan ini juga termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam. Secara geografis, perairan kepulauan Paracel mencakup perairan internasional, perairan Tiongkok, dan perairan Vietnam. Penempatan HYSY 981 bertitik kurang lebih 17 nautical miles (nm) dari pulau Triton, pada perairan barat Paracel. Vietnam mengklaim titik penempatan anjungan minyak tersebut sebagai ZEE mereka berdasarkan hukum 200nm ZEE UNCLOS. Mendukung klaim Vietnam, penempatan anjungan minyak HYSY 981

memang masuk ke dalam ZEE mereka yakni sekitar 120nm dari pesisir Vietnam (Dung, 2015). Oleh karena itu, Vietnam mengancam aksi Tiongkok sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka.

Perairan barat Paracel juga meliputi sejumlah blok minyak yang di persengketakan oleh kedua negara. Anjungan HYSY 981 sendiri bertempat diatas dua blok gas bumi yang sebelumnya telah di klaim oleh pemerintah Vietnam (Linh, 2014). Blok ini dikenal sebagai blok *Ca Voi Xanh* (CVX). Pada tahun 2011, pemerintah Vietnam menemukan kekayaan minyak dan gas bumi pada beberapa blok di sekitar titik penempatan anjungan minyak HYSY 981. Badan usaha milik negara Vietnam di bidang minyak dan gas bumi, PetroVietnam, bekerjasama dengan Exxon Mobil milik AS untuk melakukan konsesi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada dua buah blok konsesi tersebut. Penemuan minyak oleh pihak Vietnam ini mendukung asumsi Tiongkok akan adanya minyak dan gas bumi yang melimpah di sekitaran kepulauan Paracel. Pada tahun yang sama juga, yakni 2011, konstruksi dan uji coba anjungan HYSY 981 tersebut dimulai.

Tiongkok tetap melanjutkan kebijakan penempatan anjungan minyak ini meski menghadapi intervensi dari Vietnam. Dimulai dari tanggal 2 Mei 2014, anjungan minyak HYSY 981 tiba dan mulai beroperasi di sebuah blok minyak bertitik 17nm dari pulau Triton. Anjungan minyak ini dikawal oleh armada Tiongkok, yang meliputi kapal berjenis tempur maupun berjenis servis, seperti kapal penumpang dan nelayan. Tiongkok juga mendirikan area eksklusif

seluas 3nm disekitar anjungan minyak HYSY 981. Pemerintah Vietnam yang mengetahui aksi Tiongkok dari pasukan penjaga pantai mereka segera mengirimkan sebanyak kurang lebih 6 kapal ke titik anjungan minyak tersebut. Vietnam juga mengancam akan mengangkat kasus pelanggaran kedaulatan ini ke arbitrase internasional (Green, et al. 2017 hal.207-208). Tiongkok memilih untuk tidak menghiraukan tanggapan Vietnam dan menambahkan satu armada berisi 40 kapal untuk menyambut armada Vietnam di titik tersebut.

Upaya penyelesaian dengan damai justru tidak dihiraukan oleh Tiongkok, yang malah melibatkan militer dan persenjataan. Pada tanggal 7 hingga 10 Mei 2014, Tiongkok terus menambahkan armada laut mereka untuk berpatroli di sekitaran anjungan minyak HYSY 981. Vietnam pun membalas dengan menambahkan armada laut mereka sebanyak 29 kapal (Bummit, 2014). Mulailah terjadi aksi ramming atau penabrakan badan kapal antara kedua armada. Beberapa media Vietnam menyatakan bahwa kapal mereka ditenggelamkan oleh Tiongkok sebagai hasil dari aksi ini. Tiongkok bersikeras mempertahankan operasi anjungan minyak ini dengan memperluas klaim area eksklusif mereka menjadi 15nm. Tiongkok dilaporkan mulai menggunakan meriam air bertekanan tinggi (Thu, 2014). Tiongkok bahkan juga melibatkan pesawat tempur, maupun kapal bersenjata api dan rudal tempur. Jumlah kapal mencapai sekitar 36 kapal Vietnam dan 60 kapal Tiongkok (Green, et al., 2017 hal.211). Ketegangan ini terus berlanjut selama beberapa minggu.

Tiongkok juga tetap mempertahankan kebijakan penempatan anjungan minyaknya meskipun rakyat mereka di Vietnam mengalami penindasan. Dimulai dari tanggal 13 sampai 18 Mei 2014, terjadi aksi demonstrasi di Vietnam yang setelah beberapa hari meluap menjadi aksi kekerasan. Demonstrasi ini melibatkan rakyat maupun aparat kepolisian Vietnam dengan tema anti-Tiongkok. Demonstrasi melibatkan belasan ribu orang dan tersebar di berbagai wilayah seperti Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho. Demonstrasi kemudian meluap menjadi aksi kekerasan terhadap rakyat etnis Tiongkok, menyebabkan ratusan orang luka-luka dan kurang lebih 23 orang meninggal dunia. Sebanyak 400 pabrik dengan pemilik beretnis Tiongkok dirusak dan dibakar, sedangkan 1100 lainnya terpaksa ditutup. Ratusan rakyat beretnis Tiongkok di Vietnam kehilangan tempat tinggal dan harus dipulangkan karena hotel dan penginapan tidak menerima mereka. Menghadapi aksi ini, pemerintah Tiongkok hanya mengecam aksi di Vietnam dan menekan pemerintah Vietnam untuk melindungi rakyat mereka (Green, et al., 2017 hal. 214-220). Konflik di perairan tetap berlanjut dan Tiongkok bahkan menambahkan armada mereka menjadi 86 kapal.

Kebijakan Tiongkok turut mengundang kecaman dari komunitas internasional. Meskipun tidak ada intervensi secara langsung, namun sejumlah negara mengeluarkan kecaman mereka terhadap kebijakan Tiongkok (Green, et al., 2017 hal. 212&217). Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan yang mengecam aksi Tiongkok sebagai aksi yang tidak

bertanggung jawab, yang mengorbankan stabilitas dan kedamaian regional untuk melancarkan agenda yang lebih besar lagi (Psaki, 2014). AS juga menekan kedua negara untuk segera menyelesaikan konflik, dan menyatakan akan mendukung upaya arbitrase (Torode, 2014). Perdana menteri Jepang mengeluarkan kecaman serupa, bahwa aksi Tiongkok adalah aksi yang provokatif dan langkah pertama dalam rangkaian agenda maritim Tiongkok (Kishida, 2014). Australia, Inggris, dan Uni Eropa juga turut mengecam aksi Tiongkok dan menyatakan dukungan mereka terhadap Vietnam dan ASEAN.

Aksi Tiongkok juga dianggap melanggar beberapa hukum dan kesepakatan internasional. Anjungan minyak HYSY 981 bertitik 17nm dari pulau Triton yang memang dikuasai oleh tentara Tiongkok. Namun, berdasarkan UNCLOS artikel 121.3, sebuah pulau harus memiliki kapabilitas ekonomi jangka panjang untuk dapat dikatakan memiliki ZEE. Triton merupakan pulau jenis pasir yang pada waktu tertentu berada di bawah permukaan laut, sehingga flora dan fauna darat tidak dapat bertahan hidup. Triton juga dikuasai oleh Tiongkok melalui jalur militer secara paksa. Di sisi lain, titik tersebut berjarak sekitar 120nm dari pesisir pulau Ly Son, yang merupakan bagian dari kedaulatan Vietnam (Vy, 2014). UNCLOS Artikel 33 juga menyebutkan bahwa, area "contiguous", dimana dua perbatasan saling bersentuhan, tidak boleh digunakan untuk tempat eksploitasi sumber daya alam (Dung, 2015). Berdasarkan fakta-fakta ini, komunitas internasional menentang klaim Tiongkok.

Selain UNCLOS, Tiongkok juga dianggap melanggar kesepakatan multilateral terhadap negara - negara Asia Tenggara. Pada tahun 2002, Tiongkok melalui ASEAN Summit bersepakat dengan negara - negara Asia Tenggara untuk menyusun *Code of Conduct (CoC)* perihal Laut Tiongkok Selatan. Code of Conduct ini ditujukan untuk menyusun serangkaian aturan terkait pembagian kawasan, sumber daya alam, arbitrase dan pencegahan konflik di Laut Tiongkok Selatan (Kembara, 2018 hal.4-6). Penyusunan CoC ditunda hingga tahun 2013, menghadapi maraknya kasus illegal fishing, yang mempertemukan pemimpin ASEAN dengan Tiongkok (Zhou, 2017). Namun, ditengah proses penyusunan ini Tiongkok malah melakukan aksi yang bertentangan dengan kedaulatan salah satu negara ASEAN. Melalui pertemuan ASEAN Summit ke-24, pemimpin - pemimpin Asia Tenggara menunjukkan dukungan terhadap Vietnam dan menuntut Tiongkok untuk menghentikan aksinya.

Kebijakan yang dibuat oleh Tiongkok ini telah menimbulkan konflik yang menyita waktu dan tenaga Tiongkok. Ditambah lagi, berbagai negara mengecam aksi Tiongkok yang melanggar berbagai hukum internasional, dan dapat merugikan citra Tiongkok di mata komunitas internasional. Secara bilateral, aksi Tiongkok dapat merusak berbagai kerjasama bilateral antara mereka dan Vietnam. Kebijakan ini juga dapat merusak kerjasama yang telah terjalin baik antara mereka dengan Asia Tenggara. Oleh karena itu, menarik bagi penulis untuk meneliti apa tujuan Tiongkok menempatkan anjungan minyak HYSY 981 ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mempertanyakan apa tujuan Tiongkok menempatkan anjungan minyak HYSY 981 di area persengketaan lautan barat Paracel

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apa tujuan Tiongkok menempatkan anjungan minyak di lautan barat Paracel yang sedang dipersengketakan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam tulisan ini, penulis mengacu pada dua tulisan terdahulu sebagai tinjauan pustaka. Tulisan pertama berjudul "*Becoming a Great "Maritime Power": A Chinese Dream*" karya Michael McDevitt (2016). Tulisan ini menjelaskan mengenai kepentingan Tiongkok untuk menjadi kekuatan maritim besar. Salah satu agenda Tiongkok adalah memperkuat armada mereka dan melakukan ekspansi terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan cara memproyeksikan *power* atau *force* mereka.

Tulisan kedua adalah karya Pham Minh Thu (2010) yang berjudul "American Power Projection Toward Kazakhstan". Dalam tulisannya, Thu berusaha untuk menjelaskan alasan AS menjalin kerjasama dengan Kazakhstan semasa konflik di Afghanistan. *Power projection* yang dilakukan AS di kawasan Eurasia mendorong terjadinya *demand-induced scarcity* akan bahan bakar. Ini menjadi alasan AS menjalin kerjasama dengan Kazakhstan, yakni untuk memenuhi

kebutuhan energi bagi *power projection* mereka. Tulisan ini juga menjelaskan adanya keterkaitan antara energi dan *power projection*.

Geopolitik

Teori geopolitik merupakan teori yang melihat adanya keterkaitan antara faktor - faktor geografis dengan kebijakan - kebijakan politik yang diambil oleh para aktor internasional. Secara spesifik dalam ilmu hubungan internasional, geopolitik digunakan untuk mempelajari dan menjelaskan perilaku negara dalam mengambil kebijakan dengan melihat pada variabel - variabel geografis. Variabel - variabel ini meliputi iklim, topografi, demografi, teknologi terapan, dan juga kekayaan alam yang ada pada suatu kawasan (Graham, 1998).

Menambahkan mengenai pandangan geopolitik terkait peran negara dalam hubungan internasional adalah Brzezinski (1997). Ia membagi negara dalam ranah geopolitik menjadi dua jenis, yakni "active geostrategic player" dan "geostrategic pivot":

1. *Active Geostrategic Player* diartikan sebagai negara yang memiliki kapabilitas dan kepentingan nasional untuk mengerahkan power atau pengaruh mereka keluar dari perbatasan mereka.

2. *Geostrategic Pivot* diartikan sebagai negara yang peran atau signifikansinya tidak berasal dari kapabilitas atau kepentingan mereka sendiri, melainkan dari letak mereka secara geografis, dan juga konsekuensi yang mereka terima sebagai akibat dari perilaku dan kebijakan suatu active geostrategic player.

Amineh & Houweling (2004) menuliskan mengenai bagaimana geopolitik memandang energi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Bagi mereka, negara memiliki kepentingan untuk mengejar "*control sought beyond borders*", akibat adanya kebutuhan *resource* yang tidak bisa dipenuhi di teritorial negara tersebut. Salah satu dari resource ini adalah energi, yang diantaranya termasuk minyak dan gas bumi. Keduanya memiliki peran penting bagi kekuatan militer maupun ekonomi negara. Ini menjadikan energi secara tidak langsung mempengaruhi kekuatan suatu negara dalam hubungan internasional. Ini mendorong negara *active geostrategic player* untuk menjadi *power projectors* dan memproyeksikan *power* mereka ke luar batas teritorial mereka.

Power Projection

Konsep power projection dapat dijelaskan sebagai konsep yang menjelaskan fenomena dimana suatu negara melakukan pengerahan (deployment) dan sekaligus mempertahankan (sustaining) kekuatan militer mereka (*force*) di luar teritorial mereka. Hal ini didorong dari perkembangan teknologi, ekonomi, dan militer yang menjadi syarat suatu negara mampu melakukan power projection. Tujuan suatu negara melakukan power projection adalah merealisasikan ambisi semua negara yakni memperluas teritori yang mereka kontrol. Memproyeksikan *force* mendorong terbentuknya contested zones seperti di kepulauan Paracel antara Tiongkok dan Vietnam. Tidak hanya mengerahkan, namun suatu negara juga harus dapat mempertahankan *force* tersebut

secara independen selama berada di luar teritorial mereka agar dapat dikatakan sebagai sebuah proyeksi kekuatan yang berhasil.

Selain kemampuan untuk memproyeksikan *force*, suatu negara juga harus dapat mempertahankan *force* mereka diluar teritorial mereka untuk dapat dikatakan berhasil dalam memproyeksikan power mereka. Hal terpenting dalam mempertahankan (sustaining) *force* dalam melakukan power projection adalah logistik (Department of Defense, 2009). Ini meliputi pembangunan infrastruktur dari pangkalan militer, tempat tinggal dan akomodasi, rumah sakit, pusat penelitian, dan infrastruktur lain yang mendukung bertahannya *force* selama mereka berada diluar teritorial negara mereka. Beberapa bagian lain dari logistik militer lainnya meliputi kebutuhan hidup seperti makanan dan minuman, sanitasi, bahkan hiburan. Dalam memproyeksikan power, negara biasa mempersiapkan hal - hal ini sebelum melakukan *force* dalam skala besar. Ini dikenal dengan strategi *forward operating base* (FOB) (Ochmanek, 2018). Ketahanan dari power projection inilah yang dimaksud dengan sustainability.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan berupa penelitian yang bersifat deskriptif. Martono (2015) menjelaskan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan proses, mekanisme atau hubungan antarkelompok, memberikan gambaran secara verbal mengenai suatu penelitian, serta memberikan informasi terkait latar belakang tertentu. Penelitian ini

menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, seperti dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media situs web, internet, dan seterusnya (Sekaran, 2011). Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah level negara atau *state*. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui analisa data online dan analisa dokumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Militerisasi Sebagai Upaya *Power Projection* Tiongkok di Kepulauan Paracel

Beranjak dari tulisan McDevitt (2016), Tiongkok memiliki kepentingan nasional yakni mewujudkan identitas dirinya sebagai kekuatan maritim. Kepentingan Tiongkok ini juga didukung dengan pernyataan dari dokumen *The Science of Military Strategy* (2013) yang dirilis oleh akademi militer Tiongkok. Dalam dokumen tersebut, dinyatakan bahwa kepentingan Tiongkok yang utama saat ini (pada masa pemerintahan Hu) dan kedepannya adalah kepentingan maritim. Ancaman keamanan bagi Tiongkok adalah datang dari aspek maritim, maka titik fokus bagi militer Tiongkok adalah pada bidang maritim.

Untuk mencapai "*control sought beyond border*" pada kawasan yang sebagian besar merupakan perairan dan kepulauan ini, maka Tiongkok perlu meningkatkan presensi dari armada mereka di kawasan tersebut.

Tercatat bahwa dari akhir 2010 hingga awal 2011, Tiongkok yang sebelumnya cenderung tertutup terhadap kemampuan armada mereka, mulai melakukan kegiatan militer secara publik. Kegiatan militer ini mereka lakukan di perairan Laut Tiongkok Selatan, di sekitar kepulauan Paracel maupun Spratly. Tercatat dalam tiga aktivitas militer besar, Tiongkok telah melibatkan kurang lebih 1800 personil armadanya, kapal perusak, kapal fregat, kapal penyelamat, ratusan helikopter tempur, kapal minesweeper, subchasers, kapal pendarat, maupun kapal boat tempur (McDevitt, 2016; Fravel; 2012). Aktivitas militer Tiongkok ini menjadi titik awal kampanye militer Tiongkok terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan, terutama kepulauan Paracel.

Dimulai sekitar akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012, Tiongkok mulai melakukan penempatan personil militernya di kepulauan Paracel secara permanen. Pada tahun 2011, Tiongkok mulai melakukan pembangunan terhadap kepulauan Paracel. Pembangunan ini tidak lain merupakan pembangunan pangkalan militer bagi armada Tiongkok. Selain pembangunan pada pulau - pulau yang sudah ada, Tiongkok juga melakukan reklamasi terhadap beberapa terumbu karang untuk membangun fasilitas militer (Friedman, et al, 2017). Pada bulan Juli 2012, Tiongkok juga menetapkan sebuah kota di pulau Woody, yang terletak pada kelompok kepulauan amphirite (Caceres, 2013). Kota ini dikenal sebagai kota Sansha, dan dinyatakan oleh Tiongkok sebagai pusat administrasi dan komando militer bagi keseluruhan dari kepulauan Paracel.

Keinginan Tiongkok untuk mewujudkan klaim mereka terhadap kepulauan Paracel mencerminkan asumsi dari teori geopolitik bahwa kepentingan utama suatu negara adalah untuk mengekspansi teritorialnya. Sesuai dengan peran negara dalam geopolitik menurut Brzezinski (1997), sebuah active geostrategic player memiliki kapabilitas dan kepentingan nasional untuk mengerahkan power keluar teritori mereka. Dengan ini, dapat dipastikan bahwa Tiongkok memang berperan sebagai active geostrategic player. Militerisasi yang dilakukan mencerminkan kapabilitas mereka untuk mengerahkan power. Ini juga menjadikan Tiongkok sebagai power projector. Akan tetapi, aktivitas militer Tiongkok belum dapat dikatakan sepenuhnya sebagai sebuah power projection.

Aspek yang membedakan power projection dengan kampanye militer pada umumnya adalah aspek sustainability. Aspek ini telah dijelaskan sebelumnya sebagai upaya negara untuk tidak hanya sekedar mengerahkan force mereka diluar teritorial mereka, namun mempertahankan force tersebut dalam jangka panjang. Dalam kasus kepulauan Paracel, telah dijelaskan bahwa Tiongkok telah melakukan penempatan personil militer maupun pembangunan fasilitas militer di Paracel. Penetapan kota Sansha sebagai prefektur dan pusat administrasi maupun militer bagi Tiongkok juga mendukung adanya tujuan Tiongkok untuk kedepannya terus menduduki kepulauan Paracel dengan militer mereka. Akan tetapi, power projection Tiongkok masih memiliki kendala yakni belum terpenuhinya aspek sustainability dari power projection

tersebut. Agar dapat dikatakan berhasil memproyeksikan power, Tiongkok harus melakukan pembangunan yang mendukung bertahannya force mereka di kepulauan Paracel.

Hambatan *Sustainability* dari *Power Projection* Tiongkok di kepulauan Paracel

Meskipun Tiongkok terlihat berhasil melakukan pembangunan infrastruktur maupun penempatan personil militernya untuk tinggal di kepulauan Paracel, kondisi mereka masih jauh untuk bisa dikatakan layak. Kendala terbesar Tiongkok dalam melakukan power projection terhadap kepulauan Paracel adalah menciptakan kondisi hidup yang bersifat independen, atau self-sufficient, bagi kepulauan Paracel. Hambatan yang dihadapi oleh Tiongkok untuk mewujudkan kondisi hidup yang self-sufficient selama ini berakar pada kondisi alam dari kepulauan Paracel itu sendiri.

Salah satu hambatan *sustainability* utama yang dihadapi Tiongkok adalah hambatan energi dan bahan bakar. Keterkaitan antara power projection dan energi dituliskan oleh beberapa penulis seperti Lengyel, Amineh, dan Markowitz. Dalam tulisannya, Lengyel (2007) menuliskan pentingnya menyusun strategi yang berfokus pada penggunaan energi bagi suatu negara dalam melakukan power projection. Gagalnya suatu power projection seringkali disebabkan karena gagalnya mengestimasi dan memenuhi kebutuhan konsumsi energi dari kampanye militer yang tidak sedikit. Menambahkan dari tulisan Thu (2014) dan

Amineh (2007) bahwa seiring dengan meningkatnya aktivitas militer dalam suatu aktivitas power projection, maka terjadilah apa yang disebut sebagai demand-induced scarcity. Berbagai fasilitas militer seperti kapal dan jet tempur membutuhkan bahan bakar untuk dapat beroperasi.

Tiongkok diketahui kerap melakukan patroli dan latihan militer baik di kepulauan maupun perairan Paracel. Sesuai dengan pandangan beberapa penulis yang telah dijelaskan sebelumnya, aktivitas militer Tiongkok ini memakan energi dan bahan bakar yang tidak sedikit. Meskipun angka pastinya tidak dirilis, namun dilaporkan oleh Panda (2016) bahwa bahan bakar bagi militer Tiongkok di kepulauan Paracel sama langkanya dengan persediaan makanan mereka. Armada yang dikerahkan oleh Tiongkok untuk melakukan patroli dan latihan di perairan Paracel masih bergantung pada pangkalan angkatan laut Tiongkok di Hainan terkait logistik mereka, termasuk bahan bakar. Kepulauan Paracel sendiri tidak memiliki fasilitas pengisian bahan bakar yang memadai untuk mempertahankan power projection Tiongkok di kepulauan Paracel dalam jangka panjang (Halper, 2013). Dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan power projection terhadap Paracel, Tiongkok menghadapi hambatan pada aspek *sustainability* dari power projection mereka terhadap kepulauan Paracel.

Pembangunan Infrastruktur Sebagai Upaya Menciptakan *Sustainability* bagi *Power Projection* Tiongkok di Paracel

Kebijakan yang diambil Tiongkok untuk mengatasi hambatan sustainability mereka adalah melalui pembangunan infrastruktur non-militer. Pembangunan ini dilakukan Tiongkok sejak tahun 2012. Proyek pembangunan infrastruktur terhadap kepulauan Paracel ini merupakan perwujudan dari agenda yang diusung Tiongkok sejak tahun 2012. Infrastruktur yang dibangun oleh Tiongkok pada tahun 2014 berfokus pada fasilitas yang meningkatkan sustainability dari power projection mereka di Paracel. Berawal dari bulan Mei 2014, Tiongkok melakukan pembangunan infrastruktur antara lain fasilitas desalinasi air, pembangkit listrik tenaga matahari, fasilitas pengolahan limbah, dan juga anjungan HYSY 981 yang ditempatkan di perairan barat Paracel. Fasilitas desalinasi air ini diproyeksi untuk memiliki kemampuan mengolah 1000 ton air laut setiap harinya, menghasilkan 700 ton air bersih yang siap diminum. Pembangkit listrik tenaga matahari diperkirakan memiliki kapasitas tenaga 500-kilowatt (Garcia, 2014). Pembangunan infrastruktur ini dapat dijelaskan sebagai upaya Tiongkok untuk mengatasi sebagian dari hambatan terkait sustainability dari power projection mereka di kepulauan Paracel.

Pembangunan Lapangan Energi Sebagai Bagian Dari Upaya Tiongkok Untuk Mewujudkan *Power Projection* di Kepulauan Paracel

Sesuai dengan teori geopolitik, resource seperti energi menjadi salah satu variabel geografis yang memotivasi perilaku negara,

terutama bagi active geostrategic player. Kebutuhan energi dan keterbatasan energi yang ada pada teritori asalnya, mendorong negara seperti Tiongkok untuk melakukan power projection untuk mencapai control terhadap kekayaan energi diluar teritorial mereka. Namun disisi lain, power projection tersebut meningkatkan demand akan energi. Inilah argumen penulis untuk menjelaskan perilaku Tiongkok. Untuk mendukung argumen ini, kita dapat melihat pada konsumsi energi Tiongkok dalam periode waktu saat mereka memulai power projection terhadap kepulauan Paracel.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Enerdata (2009), pada periode 2011-2014 terdapat kenaikan akan angka konsumsi energi Tiongkok. Energi yang dimaksud terutama merupakan bahan bakar seperti minyak dan gas bumi. Periode ini juga bertepatan dengan periode saat Tiongkok mulai melakukan power projection terhadap Kepulauan Paracel secara intensif. Selain data tersebut, penelitian oleh Beldirici (2015) melihat keterkaitan energi dan proyeksi *force* Tiongkok secara lebih spesifik. Beldirici menyimpulkan adanya hubungan kausalitas antara aktivitas militer Tiongkok dengan konsumsi energi. Semakin meningkatnya angka pengeluaran dari aktivitas militer Tiongkok, maka dilihat konsumsi energi Tiongkok pun turut meningkat. Sebagian besar energi ini berupa bahan bakar fosil, yang digunakan sebagai bahan bakar bagi berbagai fasilitas militer Tiongkok, seperti jet dan kapal tempur. Keterkaitan ini juga didukung pernyataan dari Kang Lin (Ng & Wok, 2014), seorang ilmuwan yang terlibat dalam penempatan HYSY 981. Ia

menyatakan bahwa penempatan anjungan ini penting bagi aktivitas yang dilakukan Tiongkok di pulau - pulau seperti Paracel.

Penulis berargumen bahwa penempatan anjungan HYSY 981 merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk mewujudkan sustainability bagi power projection mereka di Kepulauan Paracel. Adanya suatu sumber energi yang dimiliki dan dikelola oleh Tiongkok di perairan Paracel dapat mengatasi kendala energi yang dihadapi Tiongkok di kepulauan Paracel. Titik penempatan anjungan HYSY 981 hanya berjarak sekitar 30km dari markas militer Tiongkok di pulau Triton. Apabila berhasil dioperasikan, Tiongkok dapat memanfaatkan hasil minyak dan gas bumi tersebut untuk mentenagai berbagai fasilitas yang mendukung sustainability dari power projection mereka di kepulauan Paracel.

Pembangunan suatu lapangan energi juga dapat mengatasi masalah ketergantungan bahan bakar armada Tiongkok di kepulauan Paracel. Telah diketahui bahwa militer Tiongkok di Paracel masih bergantung pada pangkalan laut Hainan. Fenomena ini sesuai dengan konsep power projection menurut pandangan Amineh (2007) dan Thu (2014), yang menggarisbawahi keterkaitan antara power projection dan energi. power projection menciptakan demand-induced scarcity, yang berujung pada negara mencari sumber energi untuk dieksploitasi guna mempertahankan power projection mereka. Inilah yang terjadi dengan Tiongkok, yang melakukan power projection terhadap kepulauan Paracel. Inilah yang dilihat penulis sebagai tujuan dari

penempatan anjungan HYSY 981 oleh Tiongkok di Kepulauan Paracel.

5. KESIMPULAN

Penulis menjelaskan tujuan Tiongkok menempatkan anjungan minyak HYSY 981 di area persengketaan lautan barat Paracel. Menggunakan teori geopolitik dan konsep power projection, penulis menjelaskan tujuan Tiongkok menempatkan anjungan HYSY 981 di perairan barat Paracel adalah untuk menciptakan lapangan energi bagi power projection mereka di Kepulauan Paracel. Sebagai sebuah active geostrategic player, Tiongkok memiliki tanggung jawab dan kepentingan untuk mengekspansi teritori dan pengaruh mereka keluar dari perbatasan mereka. Ini berujung pada aktivitas power projection yang mereka lakukan di Kepulauan Paracel.

Power projection yang dilakukan Tiongkok meningkatkan demand akan energi bagi Tiongkok. Di sisi lain, power projection tersebut belum terpenuhi karena menghadapi masalah yakni belum tercapainya sustainability dari force yang mereka proyeksikan di Kepulauan Paracel. Yang dimaksud dengan sustainability adalah ketahanan logistik dari pengerahan force yang dilakukan Tiongkok. Lebih spesifiknya, force yang dikerahkan Tiongkok di Paracel belum dapat memenuhi kebutuhan energi mereka secara independen. Kedua masalah ini mendorong Tiongkok untuk berkeinginan membangun suatu lapangan energi yang dapat mengatasi kedua hambatan tersebut. Blok CVX kemudian dapat dilihat sebagai kawasan dengan kekayaan energi yang profitable dan dapat dimanfaatkan oleh

Tiongkok. Didukung juga dengan pernyataan dari Tiongkok maupun data yang ada, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan Tiongkok menempatkan anjungan HYSY 981 adalah untuk menciptakan suatu lapangan energi bagi power projection mereka di Kepulauan Paracel.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bouchat, Clarence. (2014). *The Paracel Islands And U.S. Interests And Approaches In The South China Sea*. U.S Army War College.
- Caceres, Sigfrido. (2013). *China's Strategic Interests in the South China Sea*. Routledge.
- Cohen, Saul B. (2003). *Geopolitics of the World System*. Rowman & Littlefield.
- Fravel, Taylor. (2019). *Active Defense: China's Military Strategy since 1949*. Princeton University Press.
- Gendreau, Monique. (2000). *Sovereignty Over the Paracel and Spratly Islands*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Green, Michael et al. (2017). *Countering Coercion in Maritime Asia*. Rowman & Littlefield.
- Kearns, Garry. (2009). *Geography, Geopolitics, and Empire*. Wiley.
- People's Liberation Army. (2006). *The Science of Campaigns*. 4th Watch Publishing.
- "The Science of Military Strategy". (2013). Chinese Academy of Military Science.
- US Department of Defense. (2009). *The Dictionary of Military Terms*. Skyhorse Publishing.

Jurnal Ilmiah

- Amineh, Mehdi & Houweling, Henk. (2007). "Global Energy Security and Its Geopolitical Impediments—The Case of the Caspian Region". Brill Academic Publishers.
- Bildirici, Melike. (2015). "Defense, Economic Growth and Energy Consumption in China". *Procedia Economics and Finance*.
- Brzezinski, Zbigniew. (1997). *A Geostrategy for Eurasia*. Foreign Affairs.
- Dung, Pham. (2015). "Some legal aspects of the drilling rig incident in the South China Sea in 2014". Vietnam: Diplomatic Academy of Vietnam.
- Fravel, Taylor. (2012). *Maritime Security in the South China Sea and the Competition over Maritime Rights*. Center for a new American Security.
- Garcia, Zenel. (2014). "China 's Military Modernization, Japan ' s Normalization and its Effects on the South China Sea Territorial Disputes". FIU Electronic Theses and Dissertations.
- Jakobson, Linda. (2014). "China's Unpredictable Maritime Security Actors". Lowy Institute.
- Kembara, Gilang. (2018). "Partnership for Peace in the South China Sea". CSIS.
- Lengyel, Gregory. (2007). "Department of Defense Energy Strategy Teaching an Old Dog New Tricks". The Brookings Institution.

- Lyons, Youna. (2011). *Offshore Oil and Gas in the SCS*. Centre for International Law NUS.
- McDevitt, Michael. (2016). *Becoming a Great "Maritime Power": A Chinese Dream*. CNA.
- Markowitz, Jonathan & Fariss, Christopher. (2013). *Going the Distance: The Price of Projecting Power*. Routledge.
- Ochmanek, David. (2018). *Restoring U.S. Power Projection Capabilities*. RAND
- Posen, Barry. (2003). *Command of the Commons: The Military Foundation of U.S. Hegemony*. Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs.
- Sazlan, Iskandar & Buszynski, Leszek. (2007). *Maritime Claims and Energy Cooperation in the South China Sea*. ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Sumaila, Rashid, et al. (2019). *Status, Trends, and the Future of Fisheries in the East and South China Seas*. Fisheries Centre Research Reports.
- Thu, Pham Minh. (2010). *American power projection toward Kazakhstan*. Amsterdam: International School for Humanities and Social Sciences.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2011). *Review of Maritime Transport*. UN.
- Vaughn, Bruce & Morrison, Wayne. (2006). *"China-Southeast Asia Relations: Trends, Issues, and Implications for the United States"*. AS: Congressional Research Service.
- Vy, Tran. (2014). "Oil rig HD 981 incident: from the angle of the international law". Vietnam: Vietnam Law Magazine.
- Wang, Xuehui, et al. (2011). "Fish Species Diversity And Community Pattern In Coral Reefs Of The Xisha Islands, South China Sea".
- Yoshihara, Toshi. (2016). "THE 1974 PARACELS SEA BATTLE: A Campaign Appraisal". Naval War College Review.

Internet

- ASEAN meet: leaders to raise concerns about China. (2014). The Hindu. Retrieved from: <https://www.thehindu.com/news/international/world/asean-meet-leaders-to-raise-concerns-about-china/article5996067.ece>. Diakses pada bulan Desember 2019.
- "As Rosneft's Vietnam unit drills in disputed area of South China Sea, Beijing issues warning". (2018). Reuters. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-rosneft-vietnam-southchinasea-exclusive/exclusive-as-rosnefts-vietnam-unit-drills-in-disputed-area-of-south-china-sea-beijing-issues-warning-idUSKCN1I109H>. Diakses pada bulan Desember 2019.
- Bummit, Chris. (2014). Vietnam tries to stop China oil rig deployment. USA Today. Diakses melalui <https://www.usatoday.com/story/news/world/2014/05/07/vietnam-china-oil-rig/8797007/>. Diakses pada bulan Desember 2019.

- "China Approves Military Garrison for Disputed Islands". (2012). BBC. Retrieved from: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-18949941>. Diakses pada 19 Agustus 2020.
- "China Energy Information". (2019). Enerdata. Diakses melalui <https://www.enerdata.net/estore/energy-market/china.html> pada 17 November 2020.
- "China Establishes Sansha City". (2012). Xinhua. Diakses melalui https://www.chinadaily.com.cn/china/2012-07/24/content_15612099.htm. Diakses pada 20 Agustus 2020.
- Fumio, Kishida. (2014). Press Conference by Foreign Minister Fumio Kishida. Ministry of Foreign Affairs of Japan. Diakses melalui https://www.mofa.go.jp/press/kaiken/kaiken4e_000068.html. Diakses pada Desember 2019.
- Friedman, George. (2017). "Chinese Military Installations in the South China Sea". Diakses melalui <https://geopoliticalfutures.com/chinese-military-installations-south-china-sea/>. Diakses pada 19 Agustus 2020.
- Linh, Nguyen. (2014). Vietnam says China's oil rig movement into Sth China Sea is "illegal". Reuters. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/vietnam-china-oil/vietnam-says-chinas-oil-rig-movement-into-sth-china-sea-is-illegal-idUSL3N0NR0F220140505>. Diakses pada Desember 2019.
- "Not the usual drill". (2014). The Economist. Diakses melalui <https://www.economist.com/asia/2014/05/10/not-the-usual-drill>. Diakses pada Desember 2019.
- Panda, Ankit. (2016). "South China Sea: China Activates First Desalination Plant on Woody Island". The Diplomat. Diakses melalui <https://thediplomat.com/2016/10/south-china-sea-china-activates-first-desalination-plant-on-Woody-island/>. Diakses pada 28 Agustus 2020.
- Psaki, Jen. (2014). Vietnam/China: Chinese Oil Rig Operations Near the Parcel Islands. U.S Department of State. Diakses melalui <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/05/225750.htm>. Diakses pada Desember 2019.
- "Statement on developments in the South China Sea". (2014). Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Diakses melalui <https://dfat.gov.au/news/media/Pages/statement-on-developments-in-the-south-china-sea.aspx>. Diakses pada Desember 2019.
- Teddy, Ng & Kwok, Kristine. (2014). "Oil rig stops exploration work near disputed Parcel Islands a month early". SCMP. Diakses melalui <https://www.scmp.com/news/china/article/1555221/china-says-oil-rig-finishes-mission-waters-vietnam>. Diakses pada 29 Agustus 2020.
- Torode, Greg. (2014). U.S. investigates Chinese oil rig move amid Vietnam complaints. Reuters. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-china-vietnam-usa/u-s-investigates-chin>

ese-oil-rig-move-amid-
vietnam-complaints-idUSBREA450H220
140506. Diakses pada 29 Agustus
2020.

“Vietnam and China ships collide in South
China Sea”. (2014). BBC. Retrieved
from:
<https://www.bbc.com/news/world-asia-27293314>. Diakses pada
Desember
2019.

“What Does Disputed Paracel Islands Look
Like?”. (2016). BBC. Diakses melalui
<https://www.bbc.com/news/world-asia-35593162>. Diakses pada 21 Agustus
2020.

Yamaguchi, Shinji. (2017). “China’s Plan to
Establish Sansha City”. Diakses melalui
<https://amti.csis.org/chinas-plan-establish-sansha-city/>. Diakses pada 19
Agustus 2020.

Yates, Dean, et al. (2014). China's Massive
Disputed Oil Rig Near Vietnam Is
Now Drilling. Reuters. Diakses melalui
<https://www.businessinsider.com/chinas-massive-disputed-oil-rig-near-vietnam-is-now-drilling-2014-5?IR=T>.
Diakses pada Desember 2019.

Zhou, Laura. (2017). What is the South China
Sea code of conduct, and why does
it matter?. South China Morning Post.
Diakses melalui
<https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2105190/what-south-china-sea-code-conduct-and-why-does-it>.
Diakses pada Desember 2019.